Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-883

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Putusan Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr

Afifatul Karimah[1], Faridatus Sa'adah[2], Dwi Ari Kurniawati[3]
[1,2,3]Universitas Islam Malang
e-mail: [1] 22101012038@unisma.ac.id, faridatus.saadah@unisma.ac.id, dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

This study is a comparative analysis of two marriage dispensation rulings at the Mojokerto Religious Court, namely case numbers 463/Pdt.P/2025/PA.Mr and 479/Pdt.P/2025/PA.Mr. Although both rulings used the same legal basis, the final decisions differed significantly: one was granted and the other was denied. This research aims to analyze the similarities and differences in the judges' considerations and to demonstrate that the P2TP2A recommendations, as well as the factual readiness of the prospective couple (including psychological readiness and financial independence), were key factors in determining the final decision. The research aims to analyze the marriage dispensation rulings that were granted and denied at the Mojokerto Religious Court. It highlights the legal and factual aspects of the court proceedings that shaped the judges' considerations. We use a normative approach with document analysis and a juridical review of relevant laws. Our primary data is Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, while secondary data is derived from theoretical, legal, and library sources related to case numbers 463/Pdt.P/2025/PA.Mr and 479/Pdt.P/2025/PA.Mr.The research findings show that the reason for the dispensation application in Case 463/Pdt.P/2025/PA.Mr was a 17-year-and-2-month-old female applicant who was four months pregnant with her 27-year-old partner. In contrast, Case 479/Pdt.P/2025/PA.Mr involved a 16-year-and-9-month-old female who was one month and three weeks pregnant with an 18-year-and-8-month-old partner (a high school student). The judge's consideration for granting case 463/Pdt.P/2025/PA.Was that the element of "urgent reason" that was met, based on Article 7 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 and Law No. 16 of 2019, taking into account the female applicant's psychological readiness and the male applicant's financial independence and age? Conversely, the denial in case 479/Pdt.P/2025/PA.Mr was due to the failure to meet the "urgent reason" element in the same article. The P2TP2A stated that the female applicant was not yet psychologically ready, and the male applicant was still a minor, unemployed, and dependent on his parents.

Keywords: *Marriage Dispensation, Early Marriage, Religious Courts*

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

A. Pendahuluan

Pernikahan, sebagai pilar sosial dan keagamaan, kerap dihadapkan pada realitas usia yang belum ideal, terutama dengan masih maraknya pernikahan dini di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini seringkali berakar pada isu-isu kompleks seperti pergaulan bebas, tekanan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Kehamilan di luar nikah juga menjadi pemicu utama bagi orang tua untuk segera menikahkan anaknya, guna menghindari aib sosial serta menjamin status hukum anak yang akan lahir. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar yang paling cepat, meskipun belum tentu ideal secara psikologis maupun emosional bagi para pihak yang terlibat.

Meskipun hukum Islam tidak secara tegas melarang pernikahan di usia muda, mayoritas ulama menyarankan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang telah matang secara fisik dan mental. Sementara itu, secara legal formal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika usia belum mencukupi, maka satu-satunya jalur hukum yang dapat ditempuh adalah melalui permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Namun, dispensasi ini bukan hak otomatis, melainkan harus dibuktikan dengan alasan kuat dan didasarkan pada pertimbangan mendesak serta kesiapan calon mempelai.

Namun, penerapan dispensasi nikah ini bukannya tanpa tantangan. Ada kasus di mana permohonan dikabulkan, namun tak jarang pula ditolak, meskipun memiliki latar belakang atau kondisi yang tampak serupa. Inkonsistensi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar pertimbangan hakim dan sejauh mana pertimbangan sosial, psikologis, serta hukum digunakan secara proporsional. Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga konteks sosial yang melingkupi para pemohon. Di sinilah pentingnya pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis hukum, agar penegakan hukum dapat lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

Untuk menjawab dinamika tersebut, sebuah kajian komparatif terhadap dua putusan Pengadilan Agama Mojokerto yaitu Putusan Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr yang dikabulkan dan Putusan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr yang ditolak menjadi sangat relevan. Kedua perkara ini melibatkan pemohon dengan latar belakang yang relatif serupa, yakni usia anak yang masih di bawah ketentuan undang-undang dan kondisi kehamilan sebagai

faktor pendorong. Namun demikian, hasil putusan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang memengaruhi keputusan majelis hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam dasar pertimbangan hukum dan non-hukum (psikologis, sosial, budaya) yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada satu aspek saja atau pada satu putusan tunggal. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik peradilan agama dalam perkara dispensasi nikah serta memperjelas bagaimana nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak diterapkan secara nyata di lapangan. perbedaan hasil putusan dalam perkara yang serupa menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa selain norma tertulis, keputusan hakim juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi psikologis anak, kesiapan ekonomi calon mempelai, lingkungan sosial, hingga pandangan hakim terhadap kemaslahatan. Dalam konteks hukum progresif, hakim tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang", tetapi juga sebagai penentu arah keadilan substantif di tengah realitas sosial yang dinamis.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga secara praktis. Kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi peradilan agama dalam menyusun pedoman atau standar pertimbangan yang lebih jelas dan konsisten dalam menangani perkara dispensasi nikah. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi disparitas yang membingungkan masyarakat pencari keadilan. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan peningkatan batas usia perkawinan, serta perlunya sinergi antara pendekatan hukum, edukasi masyarakat, dan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara norma hukum dengan realitas sosial dalam praktik peradilan Islam.Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Apakah faktor pengajuan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim menolak Dipensasi Nikah pada Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr?

4. Bagaimana analisis studi komparatif terhadap Putusan Dispensasi Nikah dalam Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto?

Dari rumusan masalah di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul " STUDI KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Putusan Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr."

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif atau yuridis kualitatif (Rosidi, 2024). Ini berarti fokus utama penelitian adalah pada pemahaman mendalam terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang berlaku, bukan pada pengumpulan data statistik atau survei lapangan. Metode ini memungkinkan penulis untuk menganalisis data secara sistematis guna mengungkap makna dan implikasi hukum dari materi yang dikaji. Sumber data yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berbagai pendapat ahli hukum, yang semuanya berperan penting dalam membangun fondasi analisis hukum yang kuat.

Untuk mengumpulkan informasi, penulis membagi sumber data menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu individu yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Data ini sangat penting karena memberikan informasi yang mendalam, kontekstual, dan terkini, yang seringkali tidak tersedia dalam dokumen lain. Keberadaan data primer ini memperkuat keabsahan dan keakuratan temuan penelitian (Suharsimi, 2022). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teori dan kerangka hukum yang krusial untuk menganalisis kasus-kasus dispensasi perkawinan serta mendukung argumen hukum secara sistematis dan ilmiah (David, 2021).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini secara spesifik berfokus pada kajian norma hukum yang berlaku tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Peneliti mengkaji berbagai sumber hukum tertulis yang sudah tersedia, dan analisisnya didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin (Benuf, 2020). Norma hukum positif mencakup segala bentuk peraturan resmi yang ditetapkan

oleh negara, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Metode ini bersifat siklus dan berkelanjutan, di mana analisis data tidak hanya dilakukan di akhir penelitian, tetapi juga sejak awal pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga langkah yang saling berhubungan erat: reduksi data (memilah dan menyederhanakan data), penyajian data (mengatur data dalam bentuk visual seperti tabel atau bagan), dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara terus-menerus. Ketiga langkah ini dilakukan secara interaktif dan berulang untuk memastikan bahwa hasil analisis yang dihasilkan mendalam dan kredibel (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto Pada Putusan Perkara Dispensasi Nikah Yang Di Terima Di Pengadilan Agama Mojokerto

Pernikahan dini didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia 19 tahun, di mana pasangan belum siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga (Muhajarah & Fitriani, 2022). Awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, ketentuan ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyamakan batas usia minimum menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak anak dan menekan angka pernikahan dini, yang sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga menekankan pentingnya usia yang matang demi kemaslahatan keluarga (Pasal 15 ayat (1) KHI). Dengan demikian, pembatasan usia ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak dan remaja (Wahyuni, 2020; Almahisa & Agustian, 2021).

Beberapa faktor utama pemicu pernikahan dini adalah ekonomi dan pendidikan. Kondisi kemiskinan sering kali membuat orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban finansial (Kurniawati & Sari, 2020), sementara rendahnya tingkat pendidikan membuat anak kurang memiliki prospek untuk melanjutkan studi atau bekerja, sehingga dianggap sebagai beban ekonomi keluarga (Amanda et al., 2023). Selain itu, kehamilan di luar nikah adalah penyebab umum lainnya, yang mendorong pernikahan terpaksa untuk menghindari stigma sosial. Pengaruh media massa yang tidak tepat juga berperan dalam memicu perilaku berisiko di kalangan remaja (Sari &

Puspitasari, 2022). Untuk mengatasi kondisi mendesak ini, orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah, yaitu izin khusus dari pengadilan agar anak di bawah usia 19 tahun dapat menikah (Hidayatulloh, 2020; Kurniawati et al., 2023).

Proses dispensasi nikah diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama untuk calon pengantin Muslim atau Pengadilan Negeri untuk non-Muslim. Pemohon utama adalah orang tua, yang harus melampirkan berbagai dokumen administrasi, meskipun ada fleksibilitas jika dokumen tidak lengkap. Dalam prosesnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sering dilibatkan untuk melakukan asesmen psikologis. Hasil asesmen ini menjadi bahan pertimbangan utama bagi hakim, yang harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (Nuradhawati, 2020). Berdasarkan hal ini, dispensasi nikah adalah pengecualian hukum yang memungkinkan perkawinan di bawah usia minimal, dengan tujuan utama untuk memberikan solusi hukum dan melindungi hak anak dalam situasi yang mendesak.

Putusan pengadilan tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan bagaimana hakim menerapkan diskresi yudisial dalam hukum keluarga di Indonesia. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang seimbang antara hukum positif—seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019—dengan realitas sosial yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Secara sosiologis, putusan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap kondisi masyarakat yang beragam, sambil tetap berpegang pada teori perlindungan anak, yaitu memastikan setiap putusan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).

Proses pengajuan dispensasi nikah diatur secara terperinci oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, permohonan dapat diajukan oleh calon mempelai atau orang tua mereka (Al Hasan & Yusup, 2021). Dokumen ini menjadi acuan utama bagi hakim dalam setiap tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan putusan. Aturan ini memastikan bahwa semua aspek permohonan, seperti kelengkapan dokumen dan pemeriksaan para pihak, dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam kasus ini, seorang anak berusia 17 tahun 2 bulan hamil empat bulan dengan calon suaminya yang

berusia 27 tahun. Permohonan ini dikabulkan karena hakim melihat adanya alasan yang mendesak, seperti kehamilan, yang dapat menimbulkan stigma sosial. Selain itu, pasangan tersebut telah menjalani konseling, dan calon suami menunjukkan kesiapan finansial, sehingga pernikahan dinilai layak untuk dilangsungkan demi melegalkan kehamilan dan memberikan kepastian hukum. Putusan ini menyeimbangkan ketentuan hukum normatif dengan kebutuhan sosial untuk menghindari masalah yang lebih besar.

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr, permohonan dispensasi nikah ditolak. Meskipun anak perempuan yang masih berusia 16 tahun 9 bulan hamil satu bulan tiga minggu, hakim melihat bahwa anak tersebut masih seorang pelajar dan memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya. Faktor ini menjadi alasan utama penolakan, karena hakim memprioritaskan ketidaksiapan mental anak dan haknya untuk melanjutkan pendidikan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan sangat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak di atas alasan mendesak lainnya, seperti kehamilan. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip bahwa perlindungan anak adalah pertimbangan hukum yang paling utama dalam setiap kasus dispensasi nikah.

2. *Pertimbnagan Hakim tentang perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Aggama Moojokerto (Putusan Nomor 463/Pdt.p/2025/PA.Mr dan Putusan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr)*

Kajian mengenai dispensasi nikah menyoroti dua jenis pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis yang berlandaskan pada hukum formal dan non-yuridis yang mencakup aspek keadilan sosial (Mesraini & Mahmud, 2020). Hakim harus menjaga objektivitas dan independensinya untuk menjaga integritas lembaga peradilan (Mustofa, 2022). Pertimbangan hakim ini berlandaskan pada berbagai dasar hukum, termasuk Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mewajibkan hakim untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan, menegaskan bahwa perlindungan hak dan masa depan anak harus diutamakan (Maulia & Saptatiningsih, 2020).

Peran hakim dalam perkara dispensasi nikah adalah menyeimbangkan penegakan hukum dengan keadilan substantif. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali secara menyeluruh latar belakang permohonan, termasuk alasan medis, kondisi sosial, atau kehamilan yang tidak diinginkan,

sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2023. Selain itu, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan sukarela kedua calon mempelai tanpa paksaan (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Dalam konteks ini, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak dari pernikahan dini.

Landasan filosofis bagi pertimbangan hakim juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, yang mengamanatkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti hakim tidak hanya menerapkan aturan formal, tetapi juga harus peka terhadap realitas sosial. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemaslahatan yang relevan dengan kondisi masyarakat.

Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto menerapkan diskresi yudisial dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yang terlihat dari putusan yang dikabulkan maupun yang ditolak. Keputusan ini berlandaskan pada kerangka hukum yang komprehensif, terutama Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini mengatur bahwa hakim wajib menghadirkan semua pihak terkait (Pasal 10 dan 11), memberikan nasihat tentang dampak pernikahan dini (Pasal 12), dan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga seperti P2TP2A (Pasal 15 huruf d). Selain itu, hakim juga harus menilai kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek, seperti psikologis, fisik, sosial, dan finansial (Pasal 16).

Dalam perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena adanya kondisi mendesak, yaitu kehamilan empat bulan pada anak berusia 17 tahun 2 bulan. Hakim menilai bahwa mengabulkan permohonan tersebut adalah kepentingan terbaik bagi anak untuk menghindari stigma sosial dan mendapatkan kepastian hukum. Keputusan ini juga didukung oleh kesiapan finansial calon suami yang berusia 27 tahun serta laporan P2TP2A yang menyatakan anak siap secara psikologis. Putusan ini sejalan dengan Pasal 53 KHI, yang memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, menunjukkan bagaimana hukum diadaptasi untuk memberikan solusi atas permasalahan sosial yang mendesak.

Dalam memutus permohonan dispensasi nikah, hakim di Pengadilan Agama Mojokerto mendasarkan keputusannya pada kerangka hukum yang

ketat. Hakim berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur berbagai aspek, mulai dari kewajiban mendengarkan keterangan langsung dari semua pihak yang terlibat (Pasal 10 dan 11) hingga kewajiban memberikan nasihat serta menilai kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek seperti psikologis dan finansial (Pasal 12, 15, dan 16). Meskipun terdapat kondisi mendesak seperti kehamilan, keputusan hakim sangat dipengaruhi oleh penilaian terhadap kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Penolakan permohonan, seperti pada kasus Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr, terjadi karena hakim menilai anak pemohon belum siap secara mental dan memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan. Fakta bahwa calon suami juga belum bekerja memperkuat keyakinan hakim bahwa pernikahan dini akan menghambat masa depan anak, alih-alih melindunginya.

Putusan penolakan ini secara tegas menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan kondisi faktual seperti kehamilan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan mental dan hak anak atas pendidikan. Laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyatakan anak pemohon tidak siap secara psikologis menjadi pertimbangan krusial. Hakim mengutamakan kesejahteraan jangka panjang anak dibandingkan dengan solusi pernikahan yang mungkin hanya bersifat sementara. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum normatif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan realitas sosial, dengan fokus utama pada perlindungan hak dan masa depan anak.

Proses persidangan pun dirancang untuk melindungi anak. Pasal 11 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 memastikan anak dapat memberikan keterangan dengan nyaman tanpa tekanan formalitas persidangan. Selain itu, hakim juga menggali komitmen orang tua untuk terus bertanggung jawab terhadap anak pasca-pernikahan, sesuai dengan Pasal 16 huruf j. Dengan demikian, putusan hakim ini menegaskan bahwa setiap kasus dispensasi nikah dievaluasi secara cermat dan individual, di mana tujuan utama adalah menjamin masa depan dan kesejahteraan anak yang terlibat.

3. *Komparasi pertimbangan Hakim dalam perkara mengabulkan dan menolak dalam Putusan Perkara Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Mojokerto*

Dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, hakim di Pengadilan Agama Mojokerto menerapkan kerangka hukum yang konsisten, baik dalam

putusan yang mengabulkan Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr maupun yang menolak Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr. Kedua putusan ini didasarkan pada landasan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penggunaan dasar hukum yang seragam ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan hakim terstruktur dan sejalan dengan prinsip penegakan hukum dan keadilan yang berlaku.

Kesamaan juga terlihat jelas dalam prosedur persidangan yang diterapkan pada kedua kasus. Hakim secara ketat berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan ini, hakim wajib menghadirkan semua pihak terkait untuk mendengarkan keterangan langsung (Pasal 10 dan 11), memberikan nasihat tentang dampak pernikahan dini (Pasal 12), serta mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga ahli seperti P2TP2A (Pasal 15 huruf d). Prosedur ini memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi nikah diperiksa secara mendalam, objektif, dan dengan memperhatikan semua informasi yang relevan.

Meskipun putusannya berbeda, fokus utama pertimbangan hakim pada kedua kasus tetap sama, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Penilaian menyeluruh terhadap kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek, termasuk psikologis, fisik, sosial, dan finansial, menjadi kunci dalam pengambilan keputusan (Pasal 16). Selain itu, hakim juga menggali komitmen orang tua untuk memberikan dukungan berkelanjutan pasca-pernikahan (Pasal 16 huruf j). Dengan demikian, baik putusan yang mengabulkan maupun yang menolak, keduanya merupakan hasil dari upaya hakim untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum normatif dan kondisi riil yang dihadapi anak, demi menjamin kesejahteraan dan masa depan mereka. Kesamaan dalam pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak adalah pertimbangan hukum yang paling utama dalam setiap putusan dispensasi nikah.

Walaupun kedua perkara dispensasi nikah, Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr, sama-sama menggunakan landasan hukum yang identik, perbedaan mendasar terletak pada faktor-faktor non-yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim. Pada perkara 463/Pdt.P/2025/PA.Mr, putusan dikabulkan karena meskipun calon istri berusia 17 tahun 2 bulan, laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan ia sudah siap secara psikologis.

Kesiapan ini diperkuat oleh fakta bahwa calon suaminya berusia 27 tahun, dianggap matang, dan memiliki kemapanan ekonomi dengan penghasilan tetap. Kombinasi faktor-faktor ini menjadi pertimbangan kunci hakim, yang menganggap pengabulan permohonan sebagai langkah terbaik untuk melindungi status anak yang dikandung dan martabat calon istri, sejalan dengan prinsip "the best interest of the child" atau kepentingan terbaik bagi anak.

Sebaliknya, perkara 479/Pdt.P/2025/PA.Mr ditolak meskipun juga terdapat kondisi kehamilan. Hakim mendasarkan keputusannya pada laporan P2TP2A yang secara tegas menyatakan bahwa calon istri yang masih berusia 16 tahun 9 bulan belum siap secara psikis maupun psikologis untuk menikah. Kondisi ini diperparah oleh calon suami yang juga masih di bawah umur, belum memiliki pekerjaan tetap, dan calon istri masih berstatus siswi SMA. Perbedaan signifikan pada kesiapan psikologis, kemandirian ekonomi, dan status pendidikan inilah yang menjadi faktor penentu penolakan. Hakim berpendapat bahwa menikahkan anak dalam kondisi belum siap akan menimbulkan risiko yang lebih besar dan bertentangan dengan asas perlindungan anak.

Perbedaan putusan ini juga dapat dilihat dari penerapan kaidah fikih. Dalam kasus yang dikabulkan, hakim menerapkan kaidah "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan" (درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح). Hakim berargumen bahwa mengesahkan pernikahan dini dalam kondisi kehamilan adalah cara untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar, seperti stigma sosial atau penelantaran anak. Namun, dalam kasus yang ditolak, kaidah ini tidak dapat diterapkan karena faktor-faktor pendukung seperti kesiapan psikologis dan ekonomi tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berpegang pada hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kemaslahatan para pihak untuk menghindari kemudaratan yang lebih lanjut.

D. Simpulan

Faktor-faktor yang mendasari pengajuan dispensasi nikah dalam perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr memiliki perbedaan signifikan meskipun keduanya melibatkan kehamilan di luar nikah. Dalam kasus pertama, orang tua mengajukan permohonan karena anak perempuannya yang berusia 17 tahun 2 bulan telah hamil empat bulan dengan calon suami yang lebih tua dan mapan secara finansial. Motif utama pengajuan adalah untuk menghindari aib sosial dan melegalkan kehamilan. Sebaliknya, pada kasus kedua, permohonan diajukan untuk anak perempuan berusia 16 tahun 9 bulan yang juga hamil. Namun, fokus utama orang tua dalam kasus ini adalah kondisi anak yang

masih berstatus pelajar, menunjukkan ketidaksiapan mental, dan keinginan kuatnya untuk melanjutkan pendidikan. Perbedaan ini menjadi kunci dalam putusan hakim.

Hakim mengabulkan permohonan dalam perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr karena menilai telah terpenuhinya alasan mendesak sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. Putusan ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk kehamilan di luar nikah, kesiapan psikologis calon istri yang dikonfirmasi oleh P2TP2A, dan kesiapan finansial calon suami yang memiliki pekerjaan tetap. Keputusan ini juga sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang keabsahan perkawinan secara agama dan prinsip perlindungan anak. Sebaliknya, hakim menolak permohonan dalam perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr dengan pertimbangan bahwa anak pemohon belum siap secara psikologis dan emosional, yang didukung oleh hasil konseling P2TP2A. Selain itu, calon suami dinilai belum memiliki pekerjaan tetap yang memadai. Penolakan ini mencerminkan ketaatan hakim terhadap Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang memberi wewenang pengadilan untuk memberikan dispensasi hanya jika ada alasan sangat mendesak dan kepentingan anak tidak terganggu.

Perbedaan putusan ini menunjukkan pendekatan komprehensif hakim yang dipandu oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Pasal 15 PERMA memungkinkan hakim untuk meminta rekomendasi dari P2TP2A guna mengasesmen kesiapan psikologis anak, sedangkan Pasal 16 huruf d mewajibkan hakim untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan menggali informasi mengenai berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada keberadaan kehamilan, tetapi juga pada analisis mendalam terhadap kesiapan holistik calon mempelai.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Orang tua harus lebih memahami risiko pernikahan dini dan tidak menjadikannya jalan pintas untuk menyelesaikan masalah sosial. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi tentang dampak buruk pernikahan dini, serta meningkatkan layanan konseling bagi remaja. Sementara itu, lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial atau Badan Pengawas MA perlu memperketat pengawasan terhadap permohonan dispensasi nikah untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dispensasi tetap berfungsi sebagai pengecualian, bukan sebagai norma.

Daftar Rujukan

2023, SEMA NO 2 TAHUN. 2023. "Tembusan : 1 . Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ; 2 . Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial ; 3 . Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI ; 4 . Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung RI ."

Agung, Mahkamah. 2019. "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Alvionita Damayanti. 2023. "Upaya Pembuatan Jalur Evakuasi Dan Titik Kumpul Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Blora." Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 2 (1): 29–35. https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i1.243.

Amanda, Rahma, Mochamad Naim, Rizki Setiawan, Pendidikan Sosiolog, Universitas Sultan, Ageng Tirtayasa, and Serang Abstract. 2023. "Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli 9 (13): 537–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.8157376.

Arifandi, Firman. 2018. "Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan." Rumah Fiqih Publishing, 20.

Aristoni. 2021. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of." Jurnal USM Law Review 4 (1): 393–413.

Asmarini, Andini. 2021. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2 (2): 165–87. https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3 (2): 145–60. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

Darussalam, Jurnal, Pemikiran Hukum, Tata Negara, Perbandingan Hukum Issn, Pengaruh Perkawinan, Bawah Umur, Terhadap Tingkat, Kabupaten Aceh Tengah, U I N Ar, and Raniry Banda. 2023. "Fitra, H. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah . (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). Https://Repository.Ar _raniry.Ac.Id/Id/Eprint/3180 317 1" 3 (2): 317–27.

David tan. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8 (5): 1332–36. https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf.

Habibi, Ahmad. 2023. "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi." Mitsaqan Ghalizan 2 (1): 57–66. https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276.

Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. 2021. "Dispensasi Kawin

Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14 (1): 86. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107.

Hidayatulloh, Haris. 2020. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online). 5 (April).

Iaia, Fariaman. 2022. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." Jurnal Panah Keadilan 1 (2): 1–16. https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/448/374

Ilham, Muhammad. 2022. "(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa)."

Jabar, Jamal Abdul. 2021. "Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo."

Kemensesneg, RI. 2014. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." UU Perlindungan Anak, 48. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

Kurniawati, Elly, Ervina Budi, Noor Sholihah, Rahma Intan Pratiwi, Revalya Ayu, and Patrycia Nuraga. 2023. "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." Prosiding Conference On Law and Social Studies, 1–11.

Kurniawati, Novi, and Kurnia Indriyanti Purnama Sari. 2020. "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja." Jurnal Gizi 13 (1): 1–12.

Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. 2020. "Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Jurnal Kewarganegaraan 4 (1): 10–16. https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877.

Muhajarah, Kurnia, and Eka Fitriani. 2022. "Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan." JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 6 (3): 2268. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432.

Novita, Nila, and Syofiarti. 2024. "Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok." Ekasakti Legal Science Journal 1 (2): 110–19. https://doi.org/10.60034/wwc40n87.

Nurzannah, Amalia, Amanda Fildzah Sagala, and Fauziah Lubis. 2023. "AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga." AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 5 (3): 533–44. https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1991.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Pengadilan Agama Mojokerto, Anies Khoiru, Tri Eka, and Para Pemohon. 2025. "Pengadilan Agama Mojokerto."

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. 2024. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." Journal Law and

Government 2 (1): 46–58.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Undang-Undang Republik Indonesia, no. 006265: 2–6. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.
Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2020. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." Sustainability (Switzerland) 11 (1): 1–14.
Wahyuni, Alifia. 2020. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I." Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman 4 (1): 62–85. https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65.
Waluyo Sudarmaji. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah…" 3 (1): 131–45.
Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. 2021. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3 (1): 27–36. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24.
in Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Jurnal Repertorium*. http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/3318
Azhari, M. B., & Priandini, L. (2022). Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms). *Palar | Pakuan Law Review*, *8*(1), 212–227. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4777
Dr. Rohmadi, M. A. (2023). *Prosedur dan akibat hukum pembatalan perkawinan menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1947 dan hukum islam* (M. E. S. Edi Mulyono (ed.)). Muslim, Yayasan Pendidikan Cendekia.
Ismi Putri. (2023). Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa menurut kompilasi hukum islam. *Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, *13*(1), 104–116.
Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269
Izzah, H., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *2*(1), 59–78. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174
Jasmine, K. (2020). *Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan*. *9*.
Leonardo, J., Mongkaren, F., Belakang, A. L., Antow, D. T., Mamengko, R. S., Republik, U. D., & Tahun, I. (2023). Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan. *Lex Crimen*, *12*(3).
Neneng Resa Rosdiana, & Titin Suprihatin. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, *16*, 21–25. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714

Nugraheni, D. B. (2020). Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(2), 251–266. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4177

Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, *2*(2), 86–98. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894

Pengadilan Agama Pasuruan, S. (2024). *Putusan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas*.

Rika Widianita, D. (2023). Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa menurut kompilasi hukum islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap PengumpulanData. *Mitita Jurnal Penelitian*, *1*(No 3), 34–46.

Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*.

Sulistyawan, A. Y. (2021). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Ius Constituendum, Volume 6*, *18*(2), 41. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920

Suwardi. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Ensiklopediaku*, *3*(1), 6.

Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, *6*(1), 29. https://doi.org/10.32529/glasser.v6i1.1481

Yanova, M. Hendri, Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, *8*(2), 394–408.

Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtens*, *12*(1), 33–48. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957

Zakiah, N. (2021). Kekuasaan orang tua menurut kuhp dan undang- undang perkawinan. *Ash-Shalabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *7*(1), 25–30.